

SKRIPSI

FAKTOR SUKSES PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PROGRAM SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI KABUPATEN GOWA



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

FAKTOR SUKSES PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PROGRAM SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NUR

Nomor Stambuk: 105640203514

Kepada

19/03/2021

1 eq
Smb Alumni

A/0026/1PM/21CP

NUR

f²

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan penguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021.

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

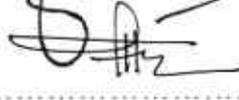
NBM: 1084366

PENGUJI

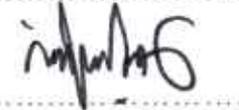
1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)

()

2. Dr. Jaelan Usman, M.Si

()

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

()

4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

()

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Faktor Sukses Penerapan *E-government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Muhammad Nur
Nomor Stambuk : 105640203514
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si


Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur

Nomor Stambuk : 105640203514

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benarkarya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 22 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Nur

ABSTARK

Muhammad Nur 2021. Faktor Sukses Penerapan *E-government* dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Dr.Jaelan Usman, M.Si dan Ahmad Taufik, S.IP.,M.Si)

Kementerian sosial meluncurkan inovasi program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Pelayanan berbasis elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis semua faktor elemen sukses yang mempengaruhi penerapan *E-government* pada program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa. Analisis ini menggunakan elemen sukses pengembangan *E-government* menurut *Harvard JFK School of Government* antara lain *Support*, *Capacity*, dan *Value* dalam Sabino Mariano (2019). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan didalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Hasil penelitian, menggunakan analisa *Support*, *Capacity*, dan *Value* menunjukkan bahwa berdasarkan variabel *Support* sudah baik jika dilihat dari segi dukungan, pengalokasian SDM, dan sosialisasi sepenuhnya sudah dilakukan oleh Kantor dinas sosial kabuten Gowa, walaupun masih ditemukan kendala pada tiap indikator tersebut. Sementara variabel *Capacity*, dari segi sumber daya finansial dan ketersediaan infrastruktur teknologi sudah memadai, namun minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang IT. Kemudian untuk variabel *Value* sudah baik, jika dilihat manfaat dari penerapan program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan proses pengelolaan data terakait bantuan sosial di kabupaten Gowa ini.

Kata kunci : *E-government*, Pelayanan Publik, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi' Alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Sang maha kuasa yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Sang Maha Pemurah yang melimpahkan segala nikmat hidup, rejeki, ilmu, serta kasih sayang-Nya pada makhluk-Nya. Sang maha pengasih dan penyayang yang selalu menghiasi kehidupan dengan jutaan rasa cinta yang mendamakkan bumi dan seisinya. Kesemuanya itu merupakan bukti keagungan sang Maha Pencipta, Allah SWT. Berkat sentuhan dan Percikan seites dari keluasan lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada manusia utusan Allah SWT, Muhammad SAW, sang pembawa cahaya dari yang gelap gulita menjadi alam yang terang. Beliau lah pejuang dan panutan sejati dunia akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga ditulis untuk menjadi bahan referensi pembaca ataupun penulis selanjutnya. Skripsi ini berjudul "**Faktor Sukses Penerapan *E-Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa**", Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala usaha, bimbingan, dorongan motivasi, semangat dan kasih sayang dari orang-orang yang mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda Rohani atas segala limpahan

kasih sayang, semangat dan dorongan serta didikannya juga senantiasa tak henti-hentinya mendoakan sehingga menjadikan motivasi untuk penulis. Serta saudara-saudaraku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada bapak **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Ahmad Taufik, S.IP, MAP** selaku pembimbing II, yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang begitu tulus dalam membantu penulis. Dan tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

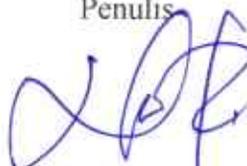
1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Inyuni Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis serta memberikan informasi
6. Kepada para narasumber/informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama melakukan penelitian.

7. Teristimewa untuk kakak saya Muhammad Ali dan adik saya Erni Rasyid yang telah membantu saya dari segi materi maupun moril dari awal proses memasuki bangku kuliah sampai selesai.
8. Teman dekat penulis Tri Wulandari, yang selalu memberikan motivasi, dan dukungan
9. Teman dekat penulis Abd Rahman, Yono, Awai Mauliana dan Asma Hendri yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta menemani penulis dalam suka maupun duka.
10. Teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2014 yang telah menemani selama perkuliahan sampai sekarang
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat Ridha dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat kepada setiap pembaca. Amin.

Makassar, 22 Februari 2021

Penulis



Muhammad Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUI	i
PENERIMA TIM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan/Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep Pelayanan Publik	9
1. Pengertian Pelayanan Publik	9
2. Unsur-unsur Pelayanan Publik	10
C. Konsep <i>E-government</i>	13
1. Pengertian <i>E-government</i>	13
2. Manfaat dan Sasaran <i>E-government</i>	19
3. Faktor-Faktor Sukses Penerapan <i>E-government</i>	20
D. Konsep Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG)	27
1. Pengertian Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> SIKS-NG	27
2. Pengertian Basis Data Terpadu (BDT)	30
3. Kegunaan Basis Data Terpadu (BDT)	31
E. Kerangka Fikir	32
F. Fokus Penelitian	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Teknik Keabsahan Data	39
G. Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	42
1. Profil Kabupaten Gowa	42
2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa	43
B. Faktor Sukses Penerapan <i>E-government</i> Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1	33
Tabel 1	38
Gambar 2	48
Gambar 3	51
Gambar 4	52
Gambar 5	53
Gambar 6	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada *good governance*. Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan *E-government*.

Salah satu tujuan implementasi *E-government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan menyukseskan hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan *E-government* bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi *E-government*, maka pemerintah pada tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa panduan, antara lain Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Daerah, Pembangunan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana *E-government* Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang *E-government*, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan panduan yang dikeluarkan pada tahun 2004 meliputi: standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (*E-services*), kebijakan tentang kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikuisertaan

swasta dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan manajemen perubahan, panduan pelaksanaan proyek dan penganggaran *E-government*, *blueprint* aplikasi *E-government* pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui Keppres No. 20 tahun 2006 yang salah satu tugasnya untuk mempercepat pelaksanaan *E-government*.

Wajah pelayanan publik saat ini sudah lebih baik. Akhir-akhir ini upaya pengembangan *E-government* sedang giat-giatnya dilakukan kalangan birokrasi publik. Kecenderungan birokrasi publik seperti kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten menerapkan *E-government* dalam sistem tata pemerintahan patut diperhatikan dan menarik untuk dikaji.

Dalam perkembangannya, sebagian besar tahap pengembangan aplikasi *E-government* yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja. Sehingga jika suatu pemerintah daerah telah memiliki website, muncul anggapan telah menerapkan aplikasi *E-government*. Padahal konsep *E-government*, tidak saja menampilkan informasi pemerintah melalui layanan website saja, melainkan terjadinya transformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh *stakeholder* yang semula menggunakan media konvensional beralih menggunakan teknologi informasi.

Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini, telah dianggap juga sebagai sumber daya yang sangat penting bagi organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta saat ini

(Hammer dan Champy, 1993). Sistem informasi dan teknologi informasi, tidak hanya berperan sebagai suatu dukungan semata, namun juga telah berperan sebagai *key operational, high potential*, peran strategis dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi (Wheelan dan Hunger, 2004).

E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Forman, 2005). Istilah *E-government* atau *electronic government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan *e-government* diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah (Kase, 2010).

Penting dicatat juga bahwa pengelolaan DT PPFM oleh Pusdatin Kemosos diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (disingkat SIKS). SIKS merupakan aplikasi online dan offline yang berfungsi sebagai tools untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian hingga diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial. SIKS sudah mengalami evolusi hingga versi yang terakhir disebut SIKS next generation (SIKS NG) 2.0. (Anwar Sitepu, Suradi, Togiaratua Nainggoan, B. Mujiyadi, 2018)

SIKS-NG merupakan sarana pengelolaan satu data terpadu nasional untuk pengentasan kemiskinan, SIKS-NG adalah sistem informasi yang

mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan aplikasi ini adalah menyediakan data kemiskinan yang akurat up-to date, dan terintegrasi. Perbaikan data dari lapangan dikelola melalui SIKS-NG dan dimanfaatkan untuk perencanaan pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan sosial/subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. (Intan Qonita N, 2020)

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Sosial semakin serius dalam menangani persoalan kemiskinan, hal ini di telaskan pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Gowa melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Gedung Balai Diklat Kabupaten. Yang menjelaskan bahwa pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa akan di lakukan melalui aplikasi SIKS-NG yang akan di operasikan para operator di masing-masing Kecamatan. Aplikasi yang di luncurkan Kementerian Sosial akan di upayakan selalu update, sehingga data bisa dilaporkan setiap dua kali setahun yaitu pada Mei dan November. Aplikasi ini untuk mensinergikan seluruh perangkat yang ada di kabupaten Gowa, mulai dari Desa, Kecamatan, Kelurahan, RT, RK, RW agar bisa melakukan pengawasan bagaimana bentuk penanganan kemiskinan yang berjalan, yang di implementasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS),Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea) namun itu tidak akan berhasil jika tidak ter verifikasi dengan baik. (Diyuni, 2018)

Namun masalah yang timbul adalah ketika tidak maksimalnya pendataan, seperti pandangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Syamsuddin

Bidol Pada Rapat Koordinasi Perbaikan Data Kependudukan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di mana mengatakan bahwa sebanyak 52.661 data kependudukan di Kabupaten Gowa tidak valid dan sekitarnya 50 persen diantaranya adalah data penerima bantuan sosial yaitu sebanyak 23.870 dan selebihnya 28.791 adalah non penerima bantuan sosial. Berdasarkan artikel tersebut hal ini berkaitan erat dengan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan masih saja ada data yang tidak valid terkait dengan penerimaan bantuan untuk warga miskin dan masih banyak terdapat data dalam basis data terpadu bukan penerima bantuan sosial. Contoh dari tidak ter update nya data dengan baik, maka ada banyak daftar nama di dinas sosial yang masih tercantum sebagai penerima bantuan namun tidak selayaknya terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. (Putri, 2018)

Kesuksesan Penerapan *E-government* dalam program SIKS-NG dilihat dalam proses pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Gowa yang mengalami peningkatan. Peningkatan pemutakhiran data terjadi pada tahun 2019 sebanyak 63.874 rumah tangga dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 83.460 rumah tangga di Kabupaten Gowa. (TNP2K 2020)

Tak hanya itu, Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gowa meminta kepada para pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan agar berkoordinasi dan saling bersinergi dengan seluruh operator SIKS-NG di wilayah masing-masing dalam melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Para kepala desa diharapkan untuk

memfasilitasi dan menyiapkan sarana dan prasarana bagi operator SIKS-NG pada wilayah kerjanya masing-masing agar supaya operator SIKS-NG dapat bekerja dengan maksimal sehingga aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyajikan data yang valid di Kabupaten Gowa. (Putri, 2020)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Faktor Sukses Penerapan *E-government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, selanjutnya dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian yaitu: Bagaimana Faktor Sukses Penerapan *E-government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Di lihat dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Sukses Penerapan *E-government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan/Manfaat

1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai tambahan literature atau bahan kajian dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui *E-government* Melalui Program SIKS-NG Di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan bahan evaluasi dalam Faktor Sukses Penerapan *E-Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*(SIKS-NG).
- b. Sebagai rujukan atau pedoman rekan mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan peneliti yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama adalah penelitian oleh Chairina (2014) meneliti tentang Kajian Faktor Sukses Implementasi *E-Government* Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 faktor sukses yang ditanyakan tingkat kesetujuannya, hanya ada 50 faktor sukses yang memenuhi kriteria pengujian. Dengan demikian 50 faktor sukses tersebut harus menjadi prioritas dan fokus bagi Pemerintah daerah lainnya untuk mendukung kesuksesan implementasi *E-government*.

Kedua adalah penelitian oleh Irawan, (2018) dosen STIA Karya Dharma Merauke, dengan judul "Sistem Pelayanan Publik Berbasis *E-government* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke" Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *E-government* dalam pelayanan publik di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih kurang dan butuh pengembangan serta perbaikan lebih lanjut agar pelayanan publik yang berbasis *E-government* ini dapat tercipta.

Ketiga adalah penelitian oleh Aditya Wijaya (2015) seorang

mahasiswa fakultas hukum meneliti tentang Penerapan *E-Government* Di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan *Electronic Government* belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang *Electronic Government* di Kabupaten Semarang. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang memberikan partisipasi dalam penerapan *Electronic Government* 2) Kendala yang menghambat dalam penerapan *Electronic Government* adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk menerapkan pemerintahan elektronik.

B. Konsep Pelayanan Publik

i. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan public (*public service*) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (2000), diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan dalam ensiklopedia administrasi (Westra, 1981) dalam (Erna Setijaningrum, 2019) diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri

kepada masyarakat. Sedangkan Moenir (1998) menyatakan bahwa hakekat pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang. Dari beberapa pengertian tersebut pada prinsipnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berlangsung bertujuan, yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok orang, atau suatu organisasi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat luas. (Erna Seujaningrum, 2019). Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 bahwa di dalam memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan di ketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan

ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidaklah sulit untuk membuktikan rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan lembaga-lembaga pemerintah. Setiap hari kita akan mendapati berita, laporan dan surat-surat pembaca yang mengkritik betapa tidak mudah mengurus KTP, SIM, STNK, sertifikat tanah, dan berbagai bentuk ijin kegiatan publik lainnya. Kritik masyarakat umumnya berkisar pada lemahnya kinerja dan profesionalisme birokrasi, prosedur pengurusan yang berbelit-belit, dan pungutan liar. (Erna Setijanigrum, 2019)

Ada beberapa point pokok yang terdapat dalam The New Public Service yaitu,

- a. Serve citizen, not customer : kepentingan publik merupakan hasil dari dialog shared value daripada agregasi kepentingan individu. Oleh karena itu pejabat public tidak hanya merespon tuntutan customer saja tetapi juga harus konsen terhadap pembangunan relationship yang berdasar pada trust dan kolaborasi di antara warga Negara,

- b. Seek the public interest : administrasi publik harus membantu kebersamaan, berbagi ide tentang public interest. Tujuan yang akan dicapai bukan digerakkan oleh kepentingan pribadi tetapi hasil kesepakatan yang melibatkan shared interest dan shared responsibility.
- c. Nilai Citizenship yang melebihi entrepreneurship : publik interest lebih baik dikembangkan oleh pejabat publik dan warga negara untuk kebaikan masyarakat daripada dilakukan oleh entrepreneur yang dikhawatirkan akan menganggap uang publik adalah miliknya.
- d. Think strategically, act democratically : kebijakan dan program-program akan sesuai dengan kepentingan publik dengan efektif dan responsible apabila dicapai melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif.
- e. Recognize that accountability is not simple : Pelayan publik harus lebih mengindahkan aturan dan hukum konstitusi, nilai kelompok, norma politik, standar professional, dan kepentingan publik agar bisa melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik.
- f. Serve rather than steer : Pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat daripada mengontrol dan melakukan steer kepada masyarakat.
- g. Value people, not just productivity : organisasi publik dan jaringannya akan lebih sukses dalam jangka panjang jika organisasi tersebut mengadopsi proses kolaborasi dan shared leadership yang didasarkan pada saling menghargai.
- (Erna Setijaningrum, 2019)

C. Konsep *E-government*

1. Pengertian *E-government*

Badu (2013) menyebut *E-government* adalah sebuah transformasi. Sebuah perubahan radikal paradigma manajemen pemerintahan. *E-government* juga dapat difahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan *web* (jaringan) komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus, merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansi maupun antar Negara. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kinerja, proses pelaksanaan layanan, serta tugas pokok dan fungsinya. Secara filosofis penerapan *e-government* merupakan bentuk kerja birokrasi yang secara dramatis mengalami distorsi pada lingkungan eksternal organisasi atau adanya tuntutan yang mengharuskan suatu perubahan (Zulhakim, 2012).

Namun di dalam penerapan *E-government* perlu adanya perencanaan dan desain model yang matang dengan melihat beberapa kebutuhan berikut:

- 1) adanya kesesuaian antara visi, misi dan tujuan *E-government* dengan visi, misi dan tujuan pemerintahan;
 - 2) adanya penyelarasan antara sistem informasi data dengan proses birokrasi;
 - 3) strategi yang tepat guna;
 - 4) memiliki proses yang terstruktur dan bertahap, dan
 - 5) adanya dukungan sumber daya manusia maupun finansial yang sangat memadai.
- (Zulhakim, 2012).

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka penerapan *E-government* diharapkan dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga pelayanan yang diharapkan dapat lebih terjangkau, dengan di perluas nya akses publik untuk memperoleh informasi. Selanjutnya dengan penerapan *E-government* tersebut, maka tercipta-lah asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-government* memberikan makna pelayanan institusi pemerintah yang dapat meminimalisir kerja birokrasi dan akhirnya pelayanan yang efisien, efektif, ekonomis dan berkeadilan bagi masyarakat secara luas.

Menurut Bank Dunia (dalam Kumorotomo, 2009), "*E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*". Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah maupun lembaga publik. Tujuannya agar relasi dalam tata pemerintahan yang melibatkan sektor swasta, masyarakat dan pemerintah dapat terselenggara dengan lebih efektif, efisien, produktif dan responsif.

Zweers dan Planque (dalam Indrajit, 2002) mengemukakan definisi lain *E-government* adalah berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan, atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, serta menawarkan nilai partisipasi yang lebih banyak

pada seluruh kalangan. Dalam memberikan informasi melalui *E-government*, juga dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan tempat. Tidak ada batasan dalam mengakses informasi yang disediakan. Sehingga dapat menciptakan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Kementerian Informasi dan Komunikasi (dalam Dewi, 2011) mengemukakan bahwa *e-government* merupakan upaya dalam mengelaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan kerangka elektronik untuk mewujudkan kualitas layanan yang efektif dan efisien. Sehingga dapat diartikan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan *e-government* tersebut kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Inter-agency Relationship*).

Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (*Government Information System*) kini telah bergeser menjadi istilah *E-government* yang sering dimaknai dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasi nya.

E-government adalah layanan *Information and Communication Technologies* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. Tuntutan

perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya.

E-government memiliki 4 hubungan dasar. *Government to Citizen/G2C* (Pemerintah dengan warga), *Government to Business/G2B* (Pemerintah dengan swasta), *Government to Government/G2G* (Pemerintah dengan pemerintah), *E-government* atau *electronic government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi; (Yuhfizar et al., 2017)

1. *Government to Citizen (G2C)*

Ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

2. *Government to Business (G2B)*

Ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.

3. *Government to Government (G2G)*

Ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan

untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

4. *Government to Employees (G2E)*

ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dan para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

5. *Government to Non-Profit (G2N)*

ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dll. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pentingnya *E-government* salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini; (Yuhefizar et al., 2017)

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2. Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*.

3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu *update*.
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
6. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

Pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun *E-government*. Berikut 6 strategi pemerintah pusat dalam penyusunan *E-government*. (Yunienza et al., 2017)

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik

juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan *e-government* sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Oleh karena itu seluruh pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun *E-government*. Baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Manfaat dan Sasaran *E-government*

Menurut Malkia (dalam Supangkat, 2004), *E-government* memiliki beberapa manfaat, antara lain .

1. Meluruskan sasaran pemerintah dalam menjamin kecepatan terhadap respon kebutuhan masyarakat. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, akurat, dan lebih baik.
2. Meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya hubungan antara berbagai pihak mendorong adanya

keterbukaan (transparansi).

3. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi mudah didapatkan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien. Misaikan dalam koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* atau bahkan *video conferencing*.
5. Menghapus lapisan dalam manajemen pemerintahan.
6. Memungkinkan masyarakat, bisnis, pemerintah, dan karyawan menemukan.

Sedangkan sasaran dalam penerapan *e-government* antara lain :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. (Cetak Biru Sistem Aplikasi *E-government*, 2004).

3. Faktor-Faktor Sukses Penerapan *E-government*

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value*. (Indrajit, 2016)

1. Elemen *Support* (pendukung)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) atau dukungan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur "*political will*" dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* akan sulit berjalan.

Kata *support* adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* (keinginan politis) untuk mengembangkan *E-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *E-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pionir dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down* (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program *E-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini bukan hanya dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk.

1. Disepakatinya kerangka *E-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas

tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;

2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, misalnya kantor *E-envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan
4. Disosialisasikannya konsep *E-government* serara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. Elemen *Capacity* (kapasitas)

Elemen Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu .

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-government*;
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian

yang dibutuhkan agar penerapan *E-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *E-government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya manusia yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

3. Elemen *Value* (Manfaat)

Elemen pertama dan kedua merupakan *supply side* (pemberi jasa dari pihak pemerintah, sedangkan elemen ketiga (*Value*) merupakan aspek yang ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (*demand side*), berbagai inisiatif *E-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *Value* (manfaat)

yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Lebih lanjut Indrajit mengungkapkan bahwa perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah *nexus* atau pusat syaraf jaringan *E-government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *E-government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk *nexus*) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. (Indrajit, 2016)

Dalam Inpres 2005 menyebutkan bahwa ada 5 faktor kesuksesan atau kesiapan dalam mengimplementasi *E-government* pada pemerintahan yaitu;

(Musfika, 2018)

1. Faktor *E-Leadership*, merupakan faktor yang menjelaskan aspek-aspek yang berhubungan dengan kesiapan dan inisiatif dari Negara.
2. Faktor Infrastruktur jaringan informasi, termasuk kecepatan akses internet, biaya penggunaan jasa internet dan termasuk juga dengan tempat penggunaan internet untuk umum serta kualitas dan jangkauan koneksi.
3. Faktor Pengelolaan informasi berupa sumber informasi, kualitas informasi serta keamanan informasi, cara pengolahan dan tempat penyimpanan informasi, dan sampai dengan cara menyalurkan dan mendistribusikan informasi.
4. Faktor Lingkungan bisnis merupakan hubungan informasi tentang bisnis dan ekonomi antara pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah dan.

5. Faktor Masyarakat dan sumber daya manusia yang merupakan faktor berhubungan dengan penggunaan layanan teknologi informasi oleh masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi informasi.

Faktor kunci keberhasilan *E-government* di empat Kabupaten/Kota (Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana) adalah; (Yuhfizar et al., 2017).

a. Kebijakan

Visi dan misi sudah terdokumentasi dengan baik, dituangkan dalam suatu dokumen berupa perancangan TIK (masterplan) atau melekat pada tupoksi organisasi yang menangani TIK yang juga tertuang dalam PERDA. Selanjutnya visi dan misi telah menjadi acuan dalam membuat kebijakan pembuatan produk hukum termasuk pembuatan Rencana Strategis (Renstra) sehingga terjadi keselarasan dimana kebijakan maupun Renstra ditempatkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Kebijakan TIK dituangkan dalam berbagai produk hukum seperti Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota dan surat edaran. Sebagian produk hukum dibuat setelah *E-government* berjalan.

b. Kelembagaan

Keberadaan unit pengelola TI mempunyai wewenang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena Bupati/Walikota memiliki political will terhadap pembangunan dan pengembangan *E-government*. Kewenangan diperlukan mengingat tugas unit pengelola TIK berkaitan dengan unit kerja yang lain seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur, sharing informasi dan data,

dan sebagainya. Adanya kewenangan yang cukup tinggi membuat fungsi koordinasi bisa dijalankan dengan baik.

Mengenai Tupoksi pengelola *E-government* di empat Kabupaten/Kota sudah tertuang dengan jelas dalam produk hukum yang menaungi pembentukan lembaga tersebut. Agar mekanisme pengembangan *E-government* bisa dijalankan dengan baik maka perlu dibuat SOP. SOP terdokumentasi dengan baik karena tertuang dalam produk hukum yakni peraturan Bupati/Walikota dan surat edaran.

c. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan melekat pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin, dalam hal ini Bupati/Walikota. Faktor kepemimpinan melihat sejauh mana andil Bupati/Walikota terkait dengan pengembangan e-government. Keempat Bupati/Walikota memiliki visi dan misi *E-government*. Meski visi dan misi TIK yang diusung agak berbeda, namun secara garis besar mereka hendak mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman dari pemimpin turut menentukan sejauh mana wawasan dan pemahaman mereka terhadap TIK yang berujung tumbuhnya ide-ide inovatif.

d. Aplikasi

Mengingat pengembangan *E-government* lingkungnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem *E-government* untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama (GIF – *Government Interoperability Framework*).

Disamping itu, sistem *E-government* lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan *E-government* yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi *E-government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

D.Konsep Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)

1. Pengertian Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dengan aplikasi ini, diharapkan berbagai program bantuan sosial kesejahteraan tepat pada sasaran sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah. Menurut Sekjen Kementerian Sosial, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap.

Disampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu berbasis TIK bertujuan untuk tersedianya sistem informasi pengelolaan data kesejahteraan sosial (KESOS), yakni data rumah tangga (RUTA) miskin dan orang tidak mampu serta data bantuan sosial/subsidi. Selain itu, agar tercapai peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial untuk menghasilkan data yang akurat dalam mencapai bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu. Dan tujuan terakhir adalah tersedianya payung hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.

SIKS-NG mengelola data mikro/detil status sosial ekonomi rumah tangga, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi. Pemutakhiran data secara periodik oleh Dinas Sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG menjadikan bantuan sosial/subsidi yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

SIKS-NG merupakan solusi bagi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif, dan efisien yang tentu saja memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Dengan SIKS-NG, pengelolaan data menjadi lebih transparan dan terpadu sehingga memberikan dampak positif pelaksanaan bantuan sosial/subsidi tepat sasaran. Pada Mei 2018, tercatat perbaikan data 81.880 tangga miskin atau 0,3 persen dan usulan baru 33.685 tangga miskin. Perbaikan ini meningkat tajam pada November 2018 sebanyak 1.982.616 tangga miskin atau 7,26 persen dan usulan baru 443.022 tangga miskin.

SIKS-NG berisikan 27 juta rumah tangga miskin/rentan, terdiri dari 28,8 juta keluarga dan 98,2 juta jiwa, yang di dalamnya terdapat 96,8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), 10 juta peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan 15,5 juta keluarga program Bantuan Sosial Pangan (BSP). Total anggaran negara untuk seluruh program penanganan kemiskinan ini adalah 81,9 triliun rupiah.

Disamping itu, SIKS-NG juga merupakan sumber data bagi program rehabilitasi sosial anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. SIKS-NG dapat diakses secara mudah oleh seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kepentingan terhadap informasi data miskin. Dinas Sosial Provinsi juga dapat memonitor secara online keaktifan kabupaten/kota di wilayahnya dalam pemutakhiran data. Demikian pula lembaga pengawasan seperti BPK, Inspektorat Jenderal, KPK, dan Bappenas dapat memonitor proses pengelolaan data secara transparan melalui SIKS-NG.

Melalui SIKS-NG, pemerintah daerah dapat mengelola data masing-masing secara online, transparan, murah, mudah, dan cepat berdasarkan Permensos Nomor 28/2017. Perbaikan data dari lapangan dikelola melalui SIKS-NG dan dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan penyairan bansos/subsidi," jelasnya.

SIKS-NG telah terbukti diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Saat ini, terdapat 396 pemerintah daerah atau 77 persen yang aktif mengirimkan perbaikan data ke SIKS-NG. Hal ini meningkat dibandingkan Mei 2018 sebanyak 262 pemerintah daerah atau 51 persen. Dengan SIKS-NG,

pemerintah daerah tidak perlu membuat aplikasi sejenis tetapi cukup menerapkan SIKS-NG yang terstandarisasi sesuai (Permensos No. 28/2017).

2. Pengertian Basis Data Terpadu

Menurut Badan Pusat Statistik (Pemutakhiran Basis Data Terpadu, 2015), perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi, dan program dari pemerintah yang dikenal dengan "Nawa Cita", yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam

penetapan sasaran program perlindungan sosial. Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Basis Data Terpadu. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tanpa dipungut biaya.

3. Kegunaan Data Terpadu

Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:

1. Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan.

Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Bagi perencana program pemerintah (pusat maupun daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

2. Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial

Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria ke pesertaaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa

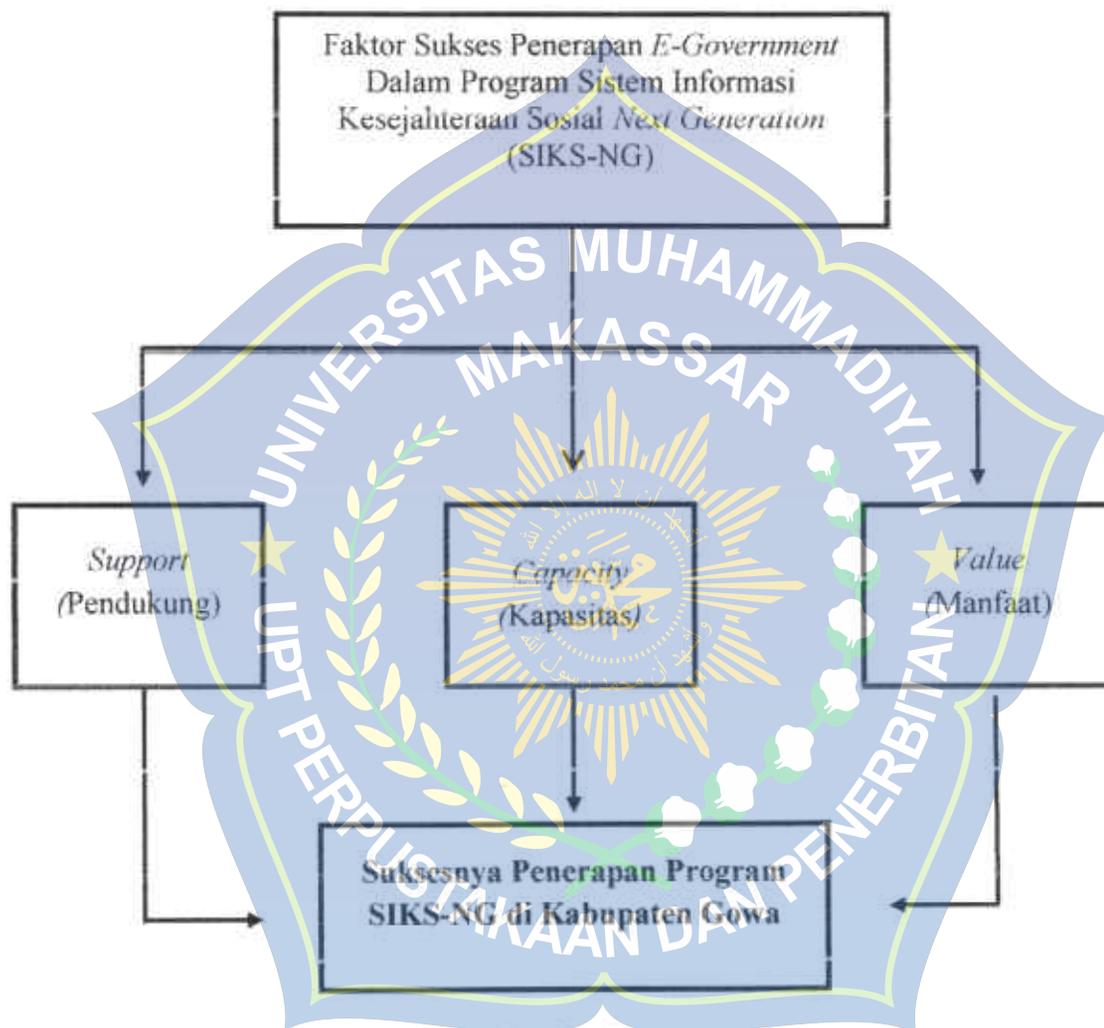
Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain. (TNP2K, 2013)

E. Kerangka Fikir

Berdasarkan tinjauan pustaka, yang menjadi titik fokus atau substansinya adalah bagaimana pengelolaan data terpadu melalui penerapan *e-government* menjadi lebih fleksibel terhadap kemajuan zaman guna mengetas angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gowa.

Aplikasi SIKS-NG di harap mampu menjadi solusi terbaik dalam upaya penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Gowa. Upaya Aplikasi SIKS-NG ini adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi oleh penyelenggara kebijakan publik yang sering dikenal dengan istilah *E-government*. Peneliti di harapkan mampu memberi solusi berupa strategi yang nantinya dapat memberi jalan keluar dalam memaksimalkan pengelolaan data terpadu kemiskinan di Kabupaten Gowa dengan merujuk pada teori konseptual dibawah ini.

Berikut ini adalah bagan dari kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 1

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini Faktor sukses penerapan *E- government* akan di fokuskan dengan pendekatan yang berangkat dari konsep (Indrajit, 2016) yang dalam bukunya mengungkapkan bahwa untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Adapun fokus yang di uraikan oleh peneliti dengan

teori yang di gunakan, semoga dapat membantu pemerintah untuk memecahkan permasalahan pendataan dalam program SIKS-NG.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

Support (Pendukung). Adanya keinginan dari kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-government* dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa. Yang dimaksud dengan dukungan disini adalah :

- a. Disepakatinya kerangka *E-government*, bagaimana Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya Dinas Sosial memberikan prioritas tinggi untuk program SIKS-NG ini dengan memberikan dukungan serta fasilitas.
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain, dalam hal ini pemerintah berfokus untuk memilih sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan finansial untuk menunjang keberhasilan program.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-government* Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gowa khususnya Dinas Sosial membangun Pusat kesejahteraan sosial (PUSKESOS) di Desa dan adanya undang-undang dan peraturan-peraturan baik dari Kementrian Sosial itu sendiri maupun pemerintah Daerah seperti, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor Dinas Sosial sebagai penanggung jawab utama, Pembentukan keanggotaan pekerja

sosial (PEKSOS) dalam melancarkan program SIKS-NG

- d. Disosialisasikannya konsep *E-government* serara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh, pemerintah melakukan sosialisasi ataupun rapat koordinasi bersama jajaran pemerintahan di bawahnya dan para Operator SIKS-NG maupun masyarakat dalam hal melaksanakan program SIKS-NG di Kabupaten Gowa dan mensosialisasikan ke masyarakat.

Capacity (Kapasitas) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah Kabupaten Gowa. Yang di maksud dengan kapasitas di sini adalah, Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial, yaitu pemerintah meningkatkan pengelolaan sumber daya finansial dalam melaksanakan program SIKS-NG di masyarakat,
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, bagaimana pemerintah memfasilitasi Operator untuk kelancaran program.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia , ketersediaan sumber daya manusia di sini di maksud adalah Operator SIKS-NG yang memiliki keahlian.

Value (Manfaat) yaitu adanya manfaat yang di berikan pemerintah kepada masyarakat dengan adanya Program SIKS-NG. Dari ketiga indikator di atas peneliti melihat kesesuaian dengan penerapan Program SIKS-NG di kabupaten Gowa, sehingga saya tertarik menggunakan teori tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah dilakukannya seminar proposal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan lebih khususnya adalah di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang terlibat langsung dengan masalah yang akan di teliti dengan dasar pertimbangan karena memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Gowa khususnya Penerapan *E-Government* dalam Program SIKS-NG di Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana Faktor Sukses Penerapan *E-government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, akan diperoleh informasi dan data yang relevan untuk menjawab sejauh mana Penerapan *E-government* dalam Program SIKS-NG khususnya Dinas Sosial /lembaga terkait lainnya dalam proses kegiatan yang ada.

Sementara itu, terkait dengan tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti mencoba mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam Penerapan *E-government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi langsung pada sumber utama yang dianggap mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam memberikan informasi dan data terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial/lembaga lainnya yang dianggap relevan dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan di Kabupaten Gowa.
2. Data Sekunder adalah data yang peneliti peroleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen berupa laporan tertulis, literasi-literasi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Faktor Sukses Penerapan *E-government* dalam Program SIKS-NG di Kabupaten Gowa

D. Informan Penelitian

Dalam proses pemilihan dan penentuan sumber data terkait informan penelitian dalam hal ini adalah peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *Purposive sampling* adalah teknik pencuaan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan subjek dalam *purposive sampling*, di dasarkan atas ciri-ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang di hubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di terapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

Informan penelitian ini sebagai berikut:

NO	Nama	Inisial	Informan	Jumlah
1	Alimuddin R, S.Sos	AR	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1
2	Muhammad Nur Ikhlis Mappaia, S.ST	MNI	Staf Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin	1
3	Muslimin	M	Operator Kabupaten Gowa	1
4	Wahyu, SE	W	Operator Desa Borong palala	1
5	Ayu Dg Kebo	ADK	Operator Desa Pallantikang	1
6	Megawati Dg Baji	MDB	Masyarakat	1
7	Diana Dg Baji	DDB	Masyarakat	1
8	Syamsiah	S	Masyarakat	1
9	Ekayanti	E	Masyarakat	1
Jumlah Informan keseluruhan				9

Tabel 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Strategi atau teknik pengumpulan informasi/data adalah prosedur atau teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, dan instrument pengumpulan data adalah perangkat yang dipilih dan digunakan dalam mengumpulkan informasi sehingga penelitian ini menjadi lebih mudah dan sederhana. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, dimana menggunakan pengumpulan data secara simultan seperti :

1) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan di teliti. Observasi di lakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan Faktor Sukses Penerapan *E-government* dalam Program System Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa.

2) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menganalisa sumber informasi yang tersedia dari dokumen-dokumen resmi seperti dokumen kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan data yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Gowa

3) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dari beberapa informan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai pihak yang berwenang dan tentunya memiliki kapasitas berkenaan dengan fokus penelitian ini dalam memberikan informasi dan data yang relevan guna keberlanjutan penelitian yang terkait untuk ke depannya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa analisis telah mulai dilakukan sejak merumuskan dan menjabarkan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, maka analisis data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa tahap yakni sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dimana peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang telah dikumpulkan dari lapangan, merangkum kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam penentuan tema dan pola yang digunakan. Proses ini dilakukan secara bertahap selama dan setelah pengumpulan data sampai pada tahap laporan hasil.

2. Penyajian Data.

Dalam kegiatan ini penulis memilah-milah informasi dan menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik yang kemudian dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penggunaan data agar tidak terjadi kekeliruan.

3. Mencermati kembali data

Mencermati kembali data yang telah diklasifikasi pada tahap kedua guna melihat apakah data tersebut sudah lengkap atau tidak yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung.

4. Menyusun kesimpulan

Dimana setelah data dianggap cukup maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa triangulasi data adalah pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan untuk data yang ada. Selanjutnya,

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga *tringulasi* dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) yakni sebagai berikut :

1. *Tringulasi* Sumber,

Tringulasi Sumber di lakukan dengan membandingkan melalui sumber berbeda sampai mendapat kebenaran atau validitas data yang ada. Misalnya melakukan perbandingan hasil pengamatan dengan wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. *Tringulasi* Teknik

Tringulasi Teknik yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan sumber data yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

3. *Tringulasi* Waktu

Tringulasi Waktu yaitu : Dengan melakukan wawancara ulang, observasi atau dengan melakukan teknik lain pada waktu yang lain pula. Hal demikian dilakukan karena pada dasarnya perubahan suatu proses dan perilaku manusia selaku informan penelitian dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Maka perlu kiranya melakukan pengamatan tidak hanya satu kali saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan

topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bonionompo dan Bonionompo Selatan.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Identitas Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa:

Nama Kantor : Dinas Sosial, Kabupaten Gowa

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Lantai II

Kelurahan : Sungguminasa

Kecamatan : Somba Opu

Kabupaten : Gowa

Provinsi : Sulawesi Selatan

No. Telpn : 0411-882272 / 0411-864024

1. Visi dan Misi Dinas Sosial

1. Visi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial merumreligius". Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

- a. Kesejahteraan Masyarakat: Merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan Yang dimaksud Keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut dilihat dari terpenuhinya hak-hak masyarakat, berhak atas pekerjaan penghidupannya berdasarkan atas pekerjaan dan keahlian gender, serta masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Secara kuantitatif kondisi ini di ukur dengan angka kemiskinan.

- b. Berkeadilan: Yang dimaksud yaitu sikap saling membantu antar sesama tanpa melihat agama, warna kulit, warna rambut, maupun usianya dan menjelaskan segala aturan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masyarakat yang bebas dari gangguan, tidak memihak dan tidak berat sebelah serta tidak condong. Secara kuantitatif Kondisi ini dapat diukur dari masyarakat yang tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender maupun wilayah.
- c. Religius : Yang dimaksud yaitu suatu sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang di peluknya, bersikap toleran terhadap pelaksana ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Kondisi tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang mengikuti aturan budaya keagamaan, masyarakat yang mengikuti ajaran agama, dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Secara kuantitatif kondisi dapat di ukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti ajaran dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Sosial Kabupaten Gowa merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu 4 (Empat) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 2. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 3. meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai syiar keagamaan.
 4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dijalankan dengan 1 tujuan yaitu: Meningkatkan penjangkauan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial.

Misi 2 : Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi Pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dijalankan dengan 1 Tujuan Yaitu: Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-

nilai syiar keagamaan, dijalankan dengan 1 tujuan, yaitu:
Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai syiar keagamaan.

Misi 4 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.

4. Struktur Organisasi :

- a. Kepala Dinas Sebagai Pemimpin Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
- b. Sekretaris Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Dinas membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Kessos anak
 - 2) Seksi kessos lansia dan penyandang rehabilitasi
 - 3) Seksi kessos tuna sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi.
 - 1) Seksi Pemberdayaan fakir miskin
 - 2) Seksi perizinan dan pembinaan lembaga sosial
 - 3) Seksi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan atau kejuangan
- e. Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Advokasi dan perlindungan sosial

2) Seksi Jaminan Sosial

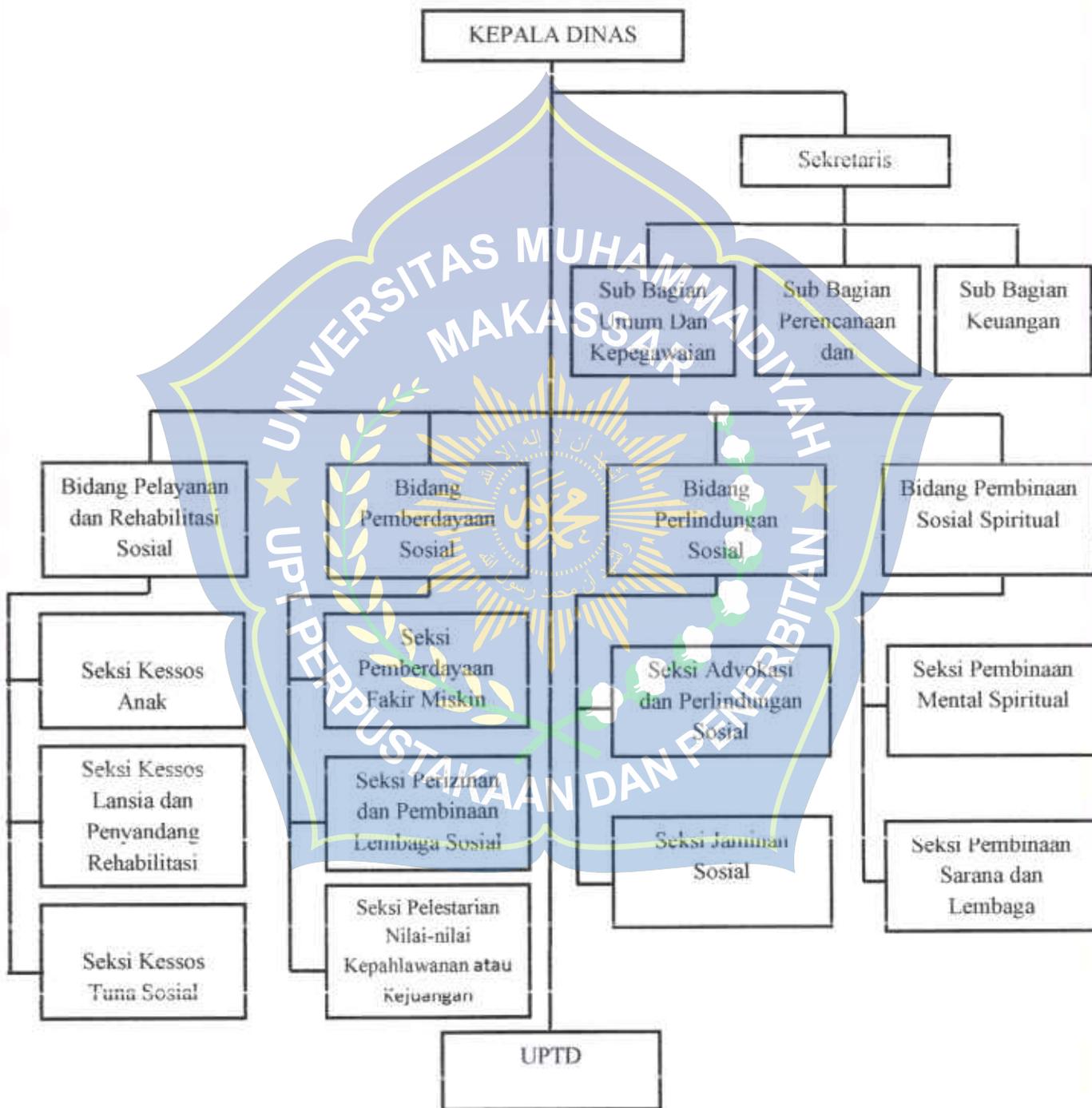
f. Bidang Pembinaan Sosial Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:

1) Seksi pembinaan mental Spritual

2) Seksi Pembinaan sarana dan lembaga.



Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa:



Gambar 2

B. Faktor Sukses Penerapan *E-government* Dalam Penerapan Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa

Beriku hasil observasi dan wawancara peneliti dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) adalah program turunan dari kementerian Sosial RI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG yaitu sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan program ini dimulai pada awal tahun 2018 dengan pemutakhiran data sebanyak 63.874 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 83.460 rumah tangga di Kabupaten Gowa dan berlangsung sampai sekarang di tahun 2021, dengan pemanfaatan sumber daya manusia di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Gowa, yaitu sebanyak 167 Desa/Kelurahan dari 18 Kecamatan yang di sebut dengan Operator Desa.

Aplikasi SIKS-NG di luncurkan Kementerian Sosial di latar belakang oleh banyaknya bantuan sosial di masyarakat yang belum tepat sasaran. Ketepatan sasaran dalam pemberian manfaat program bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu fokus Kementerian Sosial. Pemberian bansos berjumlah puluhan triliun rupiah harus mengacu pada data yang tepat. Untuk itu, pengelolaan data pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos aset penting pemerintah sebagai

salah satu penentu sasaran pemberian bansos/subsidi dan penentu berhasil tidaknya program pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 1998, pengelolaan data tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi sederhana, namun rentan terhadap kesalahan. Kini, pengelolaan data secara terintegrasi berbasis TIK merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program bansos yang pada akhirnya berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos membangun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai sarana pengelolaan satu data terpadu nasional sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan peningkatan layanan terkait teknologi informasi dan komunikasi (*E-government*) yang terarah, terpadu, sistematis, dan tepat sasaran, maka pemerintah mengatur tata kelola dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*E-government*) lingkup pemerintah daerah pedoman tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 37 Tahun 2017 tentang tata kelola dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*E-government*) lingkup pemerintah daerah. Pasal 3 yang berbunyi pemanfaatan TIK oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui *Electronic Government (E-government)*, guna membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif.

Aplikasi SIKS-NG adalah aplikasi manajemen untuk proses perbaikan dan pengusulan baru data Basis Data Terpadu (BDT) yang mana didalamnya juga

terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data Bantuan Sosial Pangan (BSP) non PKH. Proses updating data dilakukan oleh Operator Kabupaten/Kota melalui aplikasi berbasis offline.

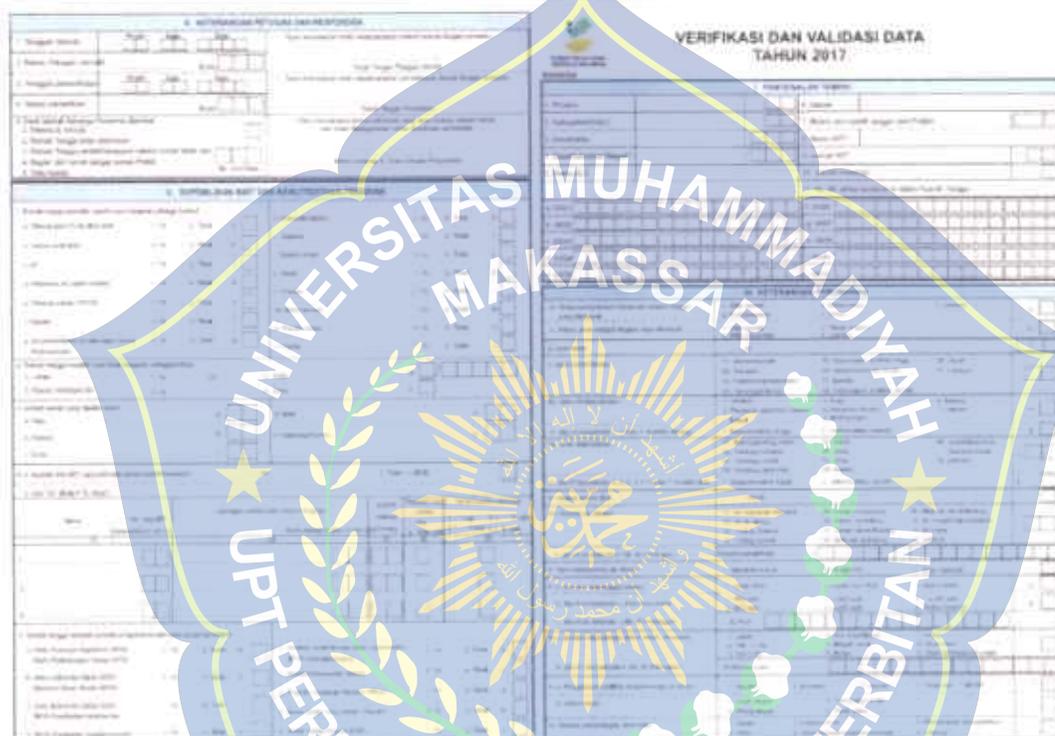
Aplikasi ini selain dapat dibuat untuk menghasilkan data ringkasan (*resume*) seperti rekapitulasi, tampilan Web GIS juga menampilkan data hasil perbaikan/pengusulan yang dikerjakan oleh operator di aplikasi berbasis offline dan memprosesnya lebih lanjut sampai menghasilkan (*generate*) Surat Pengesahan Dinas Sosial setempat langsung dari Sistem Aplikasi. Selain itu hasil update setiap daerah akan juga dapat langsung diunduh filenya setelah selesai di finalisasi datanya untuk masing-masing periode. Pemindahan rumah tangga antar wilayah dalam satu Kabupaten/Kota juga bisa dapat dilakukan. Menu awal sebelum user login pada halaman SIKS-NG terdiri dari User Manual, FAQ dan Login.



Gambar 3, Tampilan Halaman awal SIKS-NG

Perlu diketahui bahwa aplikasi SIKS-NG mengimplementasikan instrumen BDT dalam penggunaan *variable* untuk mendukung sumber data program. Data yang ditampilkan di aplikasi diambil dari data SK Mensos per

BDT Januari 2019 dan berikutnya akan diupdate sesuai SK Mensos terbaru kemudian jika ada perubahan (Update SK Mensos setiap 6 bulan sekali). Berikut tampilan instrumen BDT yang digunakan.



Gambar 4. Instrumen Verval Basis Data Terpadu (BDT)

Pada halaman beranda terdapat informasi Wilayah, kuota BSP, jumlah data BDT total serta tahap perluasan BPNT (jika ada). Sementara pada blok tengah berisi halaman informasi terkait surat edaran sebagai dasar hukum, download data rastra/BPNT per 27 Desember 2017 sebagai referensi penyaluran Januari 2018, download format MOU sebagai dasar untuk mendapatkan data BDT Daerahnya dalam format database dan juga tautan untuk masuk kehalaman upload MOU dan proses mendownload database dan aplikasi offline versi terbaru.



Gambar 5. Tampilan Halaman Beranda

Menu Verifikasi dan Validasi Data BSP terdiri dari sub menu Monitor hasil Verval, Pemeriksaan Data Perbaikan, Pemeriksaan Data Usulan, Pengesahan Data dan Lihat Hasil Pengesahan. Untuk modul BSP ini dilakukan perubahan dan proses finalisasi yang dilakukan rutin setiap bulan sesuai Pedum Rastra/BPNT. Sehingga nantinya proses yang banyak dilakukan oleh user Daerah adalah pada menu BSP ini. Proses dimulai dengan setelah berhasil melakukan import data ke online, maka data yang diupload akan terbagi ke dua submenu sesuai statusnya, yaitu : apabila data tersebut adalah data hasil perbaikan maka data tersebut dapat dilihat di submenu Pemeriksaan Data Perbaikan, sedangkan apabila data tersebut adalah data hasil pengusulan baru maka data tersebut akan tampil pada submenu Pemeriksaan Data Usulan.

Konten dari halaman menu Pemeriksaan Data Perbaikan terpisah menjadi tiga tab konten yang berisi masing-masing Belum Diperiksa, Sudah Diperiksa dan tab Data Ganda. Hasil proses *import data* pada menu *Import Data*

seluruhnya akan tampil pada tab konten Belum Diperiksa secara otomatis. Pada tampilan dalam tab ini, User Daerah selaku supervisor diharuskan memeriksa hasil *import* data yang telah dikerjakan sebelumnya oleh operator Kecamatan/Desa melihat detail data yang telah diperbaiki. Jika sudah sesuai, maka supervisor memberi ceklis pada kolom pemeriksaan untuk data suatu Rumah Tangga yang telah diperiksa tersebut, namun jika data yang dilihat ternyata ada ketidaksesuaian maka jangan diceklis supaya tidak terbawa finalisasi. Jika anda yakin bahwa semua data yang tampil dalam satu halaman (maksimal tampil dalam 1 page dalam 100 row data) sudah diperiksa dan sesuai bisa klik *Check All* untuk memilih semua data.



Gambar 6. Menu Pemeriksaan Perbaikan Data Belum Diperiksa

Sebagai salah satu prosedur perbaikan data maka data yang bisa dilakukan proses pemeriksaan adalah hanya data yang NIKnya dinyatakan valid oleh sistem, karena sistem akan secara otomatis memeriksa semua data NIK yang diimport untuk dilakukan pencocokan dengan database Disdukcapil Pusat. NIK

yang dinyatakan tidak valid maka tidak akan bisa diproses lebih lanjut kecuali sudah diperbaiki NIK nya.

Dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah peneliti menggunakan metode wawancara demi mendapatkan informasi tambahan dan detail tentang faktor sukses penerapan *E-Government* dalam program SIKS-NG di Kabupaten Gowa. Berdasarkan teori pada kerangka pikir, menurut Indrajit elemen sukses tersebut adalah: pendukung (*support*), kapasitas (*capacity*), dan manfaat (*value*). (Indrajit, 2016).

Untuk mendapatkan pernyataan dan jawaban akurat tentang faktor sukses penerapan program SIKS-NG. Peneliti mewawancarai 9 partisipan dimana semua partisipan ini adalah orang-orang yang terlibat dalam lingkup SIKS-NG yakni kepala bidang Pemberdayaan Sosial, operator SIKS-NG tingkat kabupaten dan Desa, serta masyarakat yang menjadi objek dari penerapan *E-government* ini.

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dan analisis hasil wawancara merujuk pada teori Indrajit (2016).

1. Pendukung (*support*)

Elemen pertama dan paling penting yang harus dimiliki di dalam penerapan *E-government* adalah *support* yaitu dukungan untuk diterapkannya *E-government*, baik dukungan dari pemerintah, masyarakat setempat, maupun pihak stakeholder atau swasta. Adapun dukungan yang dapat dilakukan dalam bentuk hal-hal sebagai berikut.

a) Disepakatinya kerangka *E-government*

Dalam penerapan dan pelaksanaan program SIKS-NG di Kabupaten Gowa tentunya sangat mendukung dengan adanya pelayanan berbasis

E-government, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa memberikan prioritas tinggi kepada program SIKS-NG ini dengan melakukan peningkatan kemampuan operator di bidang IT dengan mengadakan bimbingan teknis di kecamatan-kecamatan, kemudian dukungan dan persetujuan secara langsung oleh Wakil Bupati Gowa yaitu Abd Rauf, S.Sos, M.Si. dengan adanya dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak tentu memberikan dampak positif terhadap penerapan program SIKS-NG di kabupaten Gowa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas tentang support pemerintah terkait program SIKS-NG:

“kami di Pemerintahan sangat mendukung Pelayanan yang berbasis *E-government* ini, jadi ini sudah jadi prioritas di Dinas Sosial dalam pendataan, dukungan dan sumbangsi kami dari pihak dinas sosial terlebih dahulu melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada seluruh Operator Desa, Bimbingan Teknis di lakukan di setiap Kecamatan untuk dapat meningkatkan pemahaman Operator. Bapak Wakil Bupati Gowa juga menghimbau kepada seluruh camat dan kepala desa untuk memfasilitasi operator SIKS-NG memberikan dukungan Teknologi dengan memfasilitasi operator dengan Laptop demi kelancaran program ini, ” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku Narasumber yang membahas tentang dukungan pemerintah terkait program SIKS-NG, dapat diketahui bahwa Pemerintah bukan saja meluncurkan sebuah program inovatif tapi juga memberikan dukungan penuh kepada para pelaksana/operator dilapangan. Adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari pusat maupun Kabupaten, telah melakukan berbagai cara dalam pelaksanaan program SIKS-NG ini seperti meningkatkan tingkat pemahaman Operator terhadap proses pengimputan data ke dalam aplikasi SIKS-NG dengan melakukan

Bimbingan teknis ke Kecamatan-kecamatan. Pemerintah juga memfasilitasi teknologi kepada Operator. Maka dapat dikatakan bahwa *Support* atau dukungan pemerintah adalah salah satu faktor suksesnya program SIKS-NG ini. Kepedulian serta sumbangsih pihak dari atasan tentu akan menjadi sumber semangat dan cikal bakal kesuksesan program ini.

b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain).

Dalam hal ini pemerintah berfokus untuk memilih sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan finansial untuk menunjang keberhasilan program.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas pengalokasian sumber daya terkait program SIKS-NG.

“Dari segi sumber daya kami lebih memfokuskan untuk memilih Operator yang betul-betul bisa mengoperasikan Komputer.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Operator Kabupaten Gowa selaku narasumber yang membahas tentang pengalokasian sumber daya terkait program SIKS-NG, menyatakan bahwa program ini sudah berjalan lancar dengan adanya penunjukan ulang operator yang memiliki keahlian di bagian komputer dan adanya pelatihan-pelatihan di kecamatan. Terbukti setelah adanya penunjukan operator yang harus betul-betul paham teknologi maka dari segi kualitas sumber daya manusia nya meningkat dan kevalidan datanya pun meningkat. Begitu pun dari segi finansial, berkat dana

yang tersalurkan dengan tepat maka kendala yang selama ini dihadapi para operator telah terselesaikan. Tentu ini adalah salah satu faktor suksesnya suatu program.

c) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-government*

Selain dukungan penuh dari kalangan pejabat pemerintah dan juga sumber daya manusia yang juga mendukung dalam penerapan pelayanan berbasis elektronik yang di diluncurkan oleh Kementerian Sosial khususnya di Kabupaten Gowa, pengembangan *E-government* tersebut juga didukung dengan beberapa landasan-landasan yuridis yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 37 Tahun 2017 tentang tata kelola dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*E-government*) lingkup pemerintah daerah. Pasal 3 yang berbunyi pemanfaatan TIK oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui *Electronic Government (E-government)*, guna membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun Undang-Undang ini berkaitan dengan informasi pengolahan data yang didapatkan di masyarakat yang kemudian di kelola dalam suatu aplikasi atau program yang disebut SIKS-NG. dimana dalam pengolahannya semua operator menggunakan

perangkat keras maupun lunak seperti komputer, scanner, kamera, printer, serta jaringan internet. Sehingga Undang-Undang ini berkaitan dengan pengadaan komputer dan sebagainya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas tentang dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur terkait program SIKS-NG.

“Tentu ada undang-undang mendukung dalam program ini, Operator juga di berikan SK Bupati sebagai Operator dalam Desa masing-masing, selain itu kami juga membangun Pusat kesejahteraan sosial (PUSKESOS) di Desa-desa untuk mempermudah dalam proses penyaluran bantuan sosial.”
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas tentang Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur terkait program SIKS-NG dapat diketahui bahwa adanya landasan hukum atau undang-undang yang mengatur dalam suatu program sangatlah di butuhkan dalam proses pengambilan informasi dan data-data di masyarakat, di karenakan banyaknya masyarakat yang tidak mau di data ketika tidak mengetahui sumbernya. Jadi adanya bukti SK yang di buat pemerintah kepada operator untuk sebagai pengenaian dalam melaksanakan pendataan sangatlah bermanfaat, sehingga masyarakat akan lebih yakin terhadap operator, dan adana Puskesmas di setiap Desa untuk kemudahan dalam penyaluran bantuan sosial.

c) Disosialisasikannya konsep *E-government* serara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh

Pengembangan *E-government* di Kantor Dinas Sosial di Kabupaten Gowa juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui peningnya data atau proses perbaikan data dilakukan. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah pada tahun 2018 yang merupakan awal pelaksanaan program SIKS-NG dilakukan melalui sosialisasi dari Kabupaten hingga Kecamatan dan Desa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas tentang sosialisasi terkait program SIKS-NG:

“Terkait sosialisasi tentang program SIK-NG kami dari pihak birokrasi dengan memberikan arahan kepada setiap lurah atau kepala desa setempat untuk mengundang tokoh masyarakat misal, RW, RT dan staff pembantu di desa untuk mensosialisasikan program ini di Kantor Desa, kami juga mengarahkan admin yakni operator itu sendiri untuk mensosialisasikan program ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).

Dan berikut hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat selaku narasumber yang mendapatkan bantuan sosial dan terdaftar dalam data dari pemerintah.

“kalau informasi saya mendapatkan informasi program SIKS-NG dari pak RT. Waktu itu didepan rumah pak RT umumkan bahwa akan ada operator yang akan mendata dari rumah kerumah jadi di harapkan bantuan kepada warga untuk memberikan data yang di butuhkan” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator dan masyarakat terkait startegi sosialisasi pemerintah terkait program SIKS-NG dapat diketahui bahwa salah satu faktor sukses dari program SIKS-NG yaitu adanya ketekunan dari pemerintah untuk mensosialisasikan suatu program yang akan di gunakan untuk

mempermudah pendataan di masyarakat sehingga masyarakat juga memahami pentingnya pendataan ini di lakukan. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat tentu akan sangat sulit untuk suatu program dapat berkembang dan berjalan dengan baik kedepannya. Mereka juga memanfaatkan sosial media untuk mengsosialisasikan program SIKS-NG ini ke masyarakat agar lebih banyak orang yang tau.

Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa terkait dengan pengembangan penerapan *E-government* pada program SIKS-NG sudah dikatakan sangat baik, dengan banyaknya dukungan yang diberikan seperti pelatihan-pelatihan dari Kabupaten hingga ke Kecamatan, memberikan finansial yang cukup dan memberikan fasilitas yang dapat menunjang kinerja Operator, sehingga menjawab permasalahan permasalahan yang ada dan menjadikan program ini berjalan dengan sukses.

2. Kapasitas (*capacity*)

Menurut (Indrajit, 2016) Faktor *Capacity* adalah ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pembangunan konsep *E-government* agar dapat terwujud. Dalam upaya mengembangkan *E-government* di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa diwujudkan melalui tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan Faktor sukses ini yakni:

- a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government*.

Mengenai pendanaan dalam pengembangan *E-government* di kabupaten Gowa sendiri sudah memiliki anggaran yang mencakup semua kegiatan

tidak terkecuali untuk anggaran dalam melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh operator di kabupaten Gowa. Mengenai alokasi dana yang dikeluarkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan SIKS-NG berasal dari APBN kementerian sosial. Sedangkan setelah dilakukan evaluasi dalam hal pengadaan barang berupa laptop kepada operator, maka diperlukannya anggaran untuk memberikan pengembangan program SIKS-NG ini baik itu terkait internet dan sebagainya agar perkembangan program ini terus berlanjut dan semakin sukses maka untuk pendanaan dalam hal ini menggunakan APBD dari desa masing-masing.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas tentang Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup terkait program SIKS-NG.

“Sumber dana program SIKS-NG itu bersumber dari APBN Kementerian, namun dalam pengadaan alat teknologi berupa laptop itu di berikan kewenangan kepada Desa masing-masing dalam memfasilitasi operatornya(Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku Narasumber yang membahas tentang program SIKS-NG, dapat diketahui bahwa Ketersediaan sumber daya finansial merupakan faktor sukses dari program SIKS-NG ini. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat esensial. Sulit untuk suatu program dapat berjalan dengan baik dan lancar jika faktor financial itu tersendiri tidak tercukupi. Di kabupaten Gowa sendiri pihak kantor dinas menjamin finansial cukup sebelum dilakukan nya suatu kegiatan.

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Terkait dengan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terkait program SIKS-NG yang diluncurkan kementerian sosial di kabupaten Gowa sudah memadai untuk mendukung penerapan *E-government* di setiap kabupaten/desa. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur pengadaan laptop. Penyerahan laptop yang berkapasitas besar diberikan dinas sosial kepada para operator tentu sangat membantu demi berjalannya proses pendataan dengan lancar. Hal ini awalnya menjadi suatu kendala setiap operator untuk menjalankan tugasnya, namun saat ini hal tersebut tidak lagi menjadi masalah.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan operator desa Borong Palala selaku narasumber yang membahas tentang informasi terkait program SIKS-NG ini:

“Karena dalam menjalankan aplikasi SIKS-NG ini membutuhkan teknologi atau laptop yang memiliki kapasitas yang tinggi, namun laptop kami tidak mampu menjalankan aplikasi SIKS-NG ini, sehingga kami difasilitasi oleh pemerintah dengan laptop.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2021).

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian

Sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan program SIKS-NG di Kabupaten Gowa yaitu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau *skill* dibidang IT. Paling tidak mereka telah memiliki bekal pengetahuan tentang komputer, aplikasi dan penggunaannya. Jika dari pendidikannya dari pihak dinas tidak mempermasalahkan pendidikan harus Si yang penting paham dan ingin terus belajar serta rajin ikut pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Maka disinilah peran penting pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada para operator agar mereka dengan cepat berkembang.

Ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan hal yang sangat penting dalam konsep penerapan *E-government* karena dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mendorong pengembangan dan implementasi *E-government*, sebaliknya apabila sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi harapan yang diinginkan maka hal ini dapat menghambat pengembangan *E-government*.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku narasumber yang membahas terkait program SIKS-NG.

“Kami menginstruksikan untuk menunjuk operator yang mempunyai kemampuan di bidang IT, dan kami meningkatkan kemampuan setiap operator dengan memberikan bimbingan teknis di setiap kecamatan (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).

Berikut hasil wawancara peneliti dengan operator desa Borong palala selaku narasumber yang membahas tentang informasi terkait program SIKS-NG:

“Pemerintah menfokuskan memilih operator yang betul-betul bisa mengoperasikan komputer. Dinas Sosial juga mengarahkan kami selaku Operator Desa untuk mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK),”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan operator desa selaku narasumber yang membahas tentang informasi terkait program SIKS-NG dapat diketahui bahwa faktor sukses *E-Government* tidak bisa terpisahkan dari kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan pemaparan jawaban diatas pemerintah benar-benar menfokuskan dalam memilih operator yang betul-betul bisa mengoperasikan komputer dan memberikan pelatihan-pelatihan terkait cara atau proses pendataan dan pengimputan data

SIKS-NG yang secara langsung kegiatan ini telah meningkatkan kualitas skill kualitas sumber daya manusia para operator kelurahan/desa di kabupaten Gowa, sehingga setelah dilakukan berbagai pelatihan, Operator tidak lagi mengalami kendala dalam proses pengimputan data.

Capacity atau Kapasitas, Ketersediaan sumber daya, dalam mengembangkan *E-government* di kabupaten Gowa baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial di nilai sudah sangat baik. Terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu operator telah dibekali dengan ilmu dan *skill* dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial di kecamatan-kecamatan, sehingga Operator tidak lagi mengalami masalah dalam pengimputan data. Kemudian terkait dengan sumber daya financial atau anggaran yang disediakan sudah memadai dimana anggaran ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial melalui Kantor dinas sosial kabupaten Gowa.

3. Manfaat (*Value*)

Menurut (Indrajit, 2016) Elemen *value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *E-government*. Dalam Faktor *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *E-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Kunci kesuksesan penerapan *e-government* yang ketiga ialah *value*. Penerapan *E-government* mempunyai berbagai manfaat terutama bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Penerapan *E-government* dalam pelayanan pendataan masyarakat melalui program SIKS-NG ini dilihat dari segi manfaat sudah di

rasakan oleh masyarakat dengan adanya sistem Anjungan Paspor Mandiri yaitu dimana masyarakat dapat terdata dengan valid sesuai keadaan dilapangan. Masyarakat juga dengan mudah mendapatkan informasi mengenai bantuan-bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan sosial dan masyarakat terkait program SIKS-NG yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

“Kalau manfaatnya bagi masyarakat itu sangat banyak, ketika masyarakat sudah terdata dalam pendataan ini, sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT), dimana nantinya data tersebut akan dimanfaatkan untuk pengusulan keluarga penerima manfaat (KPM) baik itu PKH, RASTRA, KIP, KIS, maupun Subsidi listrik dari PLN”, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dengan adanya portal yang di sediakan di internet untuk cek kepesertaan di dtk.kemensos.go.id, data akan lebih akurat (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2020).

“Manfaatnya banyak menurutku salah satu nya pasti meratanya pembagian bantuan kepada masyarakat penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, kami sebagai masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, lebih transparan dalam penyaluran bantuan” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang pemberdayaan sosial dan masyarakat, manfaat dari program SIKS-NG ini sangat besar terhadap masyarakat, dengan adanya program ini masyarakat yang tergolong kurang mampu akan terdaftar dalam data kesejahteraan sosial, sehingga akan lebih mudah mendapatkan bantuan sosial dan akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, tidak hanya itu, dengan adanya aplikasi pengolahan data ini, maka penyaluran bantuan sosial akan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan. Manfaat juga di dapatkan pemerintah

dengan adanya Program SIKS-NG ini pemerintah akan lebih mudah mengetahui masyarakat yang kurang mampu, sehingga dalam proses penyaluran bantuan akan lebih mudah menyetapkan bantuan kepada masyarakat.

Value atau Manfaat dari adanya program SIKS-NG di Kabupaten Gowa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan lebih akuratnya data penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dengan adanya portal yang di sediakan di internet untuk cek kepesertaan di dtk.kemensos.go.id, lebih transparan dalam penyaluran bantuan sehingga tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan, jadi program ini di nilai berhasil dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Merujuk dari pembahasan dan serangkaian hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti terkait faktor sukses penerapan *E-Government* dalam program SIKS-NG diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah sudah dikatakan sangat baik, dengan banyaknya dukungan yang diberikan seperti pelatihan-pelatihan dari Kabupaten hingga ke Kecamatan, memberikan finansial yang cukup dan memberikan fasilitas yang dapat menunjang kinerja Operator.

Capacity atau Kapasitas di nilai sudah sangat baik, dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu operator telah dibekali dengan ilmu dan *skill* dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial di kecamatan-kecamatan. Kemudian terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran yang disediakan sudah memadai, dimana anggaran ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial melalui Kantor dinas sosial kabupaten Gowa.

Value atau Manfaat dari adanya program SIKS-NG di Kabupaten Gowa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan lebih akuratnya data, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, lebih transparan dalam penyaluran bantuan

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka peneliti hendak memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi pemerintah.

Pemerintah di harapkan mampu lebih fokus dalam menangani pendataan serta penyaluran bantuan sosial, sehingga data yang di hasilkan dapat menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan program SIKS-NG dalam menangani persoalan data, untuk menghasilkan data yang valid atau data yang tepat pada sasarnya.

Pemerintah hendaknya lebih terbuka kepada masyarakat dalam penerapan program-program sosial dari pemerintah dengan memperbanyak sosialisasi, agar masyarakat tidak buta akan informasi terhadap program-program sosial dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sitepu, Suradi, Togiaratua Nainggolan, B. Mujiyadi, I. (2018). Pemanfaatan Data Terpadu. In *pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial* (p. 124).
- Batinggi A, Badu Ahmad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dhyni. (2018). *Tanggulangi Kemiskinan, Dinsos Gelar Sosialisasi Aplikasi SIKS-NG*. Humas.Gowakab.Go.Id. <https://humas.gowakab.go.id/tanggulangi-kemiskinan-dinsos-gelar-sosialisasi-aplikasi-siks-ng/>. Diakses, 3 November 2020
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan..* Bandung. Humaniora.
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. *Electronic Government*, 84.
- Intan Qonita N. (2020). *Kemensos Kembangkan Satu Data untuk Penerima Manfaat dan LKS*. Kemsos.Go.Id. <https://kemsos.go.id/kemensos-kembangkan-satu-data-untuk-penerima-manfaat-dan-lks>. Diakses, 3 November 2020.
- Irawan, A. (2018). *Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Meruoke*. 7(1), 20-37.
- Irmayani & Suradi, 2018. *Penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di kota semarang*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia/article/view/1568> . Diakses, 1 November 2020.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Muatamin, Siti Walida, Dkk. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*. 165-173

Musfikar, R. (2018). *Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada*. 2, 48–

58.

Nainggolan, T. (2019). *Dinamika Psikologis Pemanfaatan Data Terpadu Dalam Penanganan Kemiskinan Di Deli Serdang*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Vol. 1, Issue Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI, pp. 99–111).

Putri. (2018). *Begini Upaya Pemkab Gowa Tuntaskan Kemiskinan*. BERITA.NEWS <https://berita.news/2020/03/11/begini-upaya-pemkab-gowa-tuntaskan-kemiskinan/>. Diakses 5 November 2020.

Rukminto, Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Pers.

Sabino Mariano. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Setjaningrum Erna. (2019). Inovasi Pelayanan Publik. In *PI. Medika Aksara Globalindo, Surabaya*. <http://repository.unair.ac.id/97696/>

Supriyanto, Eko Eddy. 2016. *Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. <http://e-journalupstegal.ac.id/index.php/jip/article/view/7>, diakses tanggal, 28 Januari 2020.

Supriadi, 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dalam penanggulangan Kemiskinan Melalui program Khilaf Di Kota Palopo*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25414> , diakses tanggal, 28 Januari 2020.

Supriatna, Tjahya. 2000. *Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung. Humaniora Utama Press.

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.

Supriatna T. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta Rineka ipia.2000.

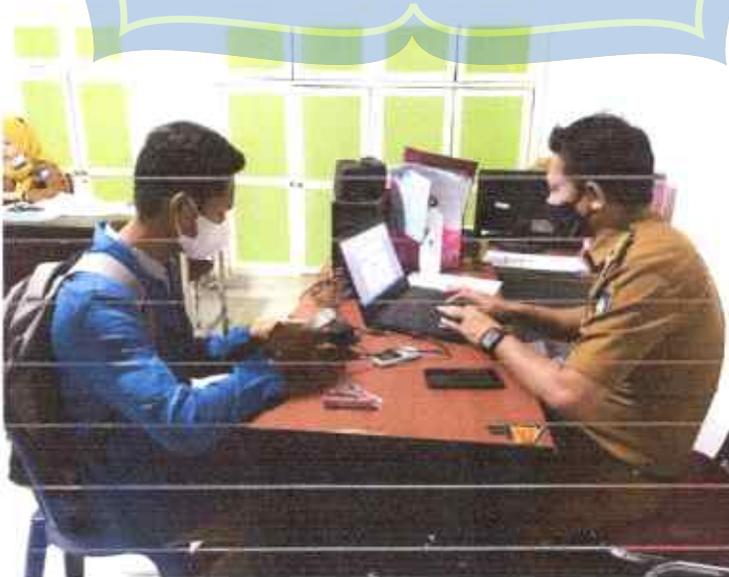
- Suradi. (2011). Peranan Sektor Informal Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Informasi*
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK Vol.08/No.03/September/2005
- TNP2K. (2013). Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 20 www.tnp2k.go.id
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- World Bank. (2010). The World Bank Annual Report 2010. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2010/0,contentMDK:22626653~menuPK:7148629~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:707417900.html>. Diakses 1 November 2017.



LAMPIRAN



Wawancara bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Staff Dinas Sosial Kabupaten Gowa (10 Desember 2020).



Wawancara bersama Staff Dinas sosial Kabupaten Gowa(10 Desember 2020).



Wawancara bersama Operator SIKS-NG Kabupaten Gowa (10 Desember 2020).



Wawancara Bersama Operator Desa SIKS-NG (13 Desember 2020).



Wawancara Bersama Masyarakat (15 Desember 2020).

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plava.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 117/05/C.4-VIII/XI/42/2020

: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1115/FSP/A.1-VIII/XI/1442 H/2020 M tanggal 10 Nopember 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR

No. Stambuk : 10564 0203514

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Faktor sukses E-Government dalam program sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Nopember 2020 s/d 14 Januari 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Retua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8406/S.01/PTSP/2020
Tempat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 117/05/C.4-VIII/XI/42/2020 tanggal 12 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR
Nomor Pokok : 105640203514
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR SUKSES E-GOVERNMENT DALAM PROGRAM SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 November 2020 s/d 14 Januari 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Revisi Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 13-11-2020





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 17 November 2020

K e p a d a

Nomor : 503/805/DPM-PTSP/PENELITIAN/11/2020
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Di -
Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 8406/S.01/PTSP/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR
Tempat/Tanggal Lahir : Teamante 11 Agustus 1996
Nomor Pokok : 105640203514
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Teamante

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**FAKTOR SUKSES E-GOVERNMENT DALAM PROGRAM SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI KABUPATEN GOWA**"

Selama : 14 November 2020 s/d 14 Januari 2021
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
 2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Peringgal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Nur
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	15%	15 %
2	Bab 2	17%	25 %
3	Bab 3	15%	15 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 5 Februari 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartantan, S.IP.,M.IP
NBM. 137 4895

**Mengetahui,
Ketua Prodi**

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si
NBM. 103 1102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0150/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.
- MENINGAT** : 1. Undang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar
- MEMPERHATIKAN** : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN**
Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 11 Februari 2021 M



Dr. Hj. Invari Malik, S.Sos, M.Si

NBM 730727

Tembusan :

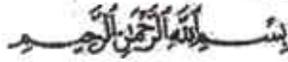
1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

Aplikasi Surat Keputusan:
Nomor : 0150/FSP/A.3-VIII/VI/42/2021
Tanggal : 11 Februari 2021

Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Sabtu, 13 Februari 2021, Jam : 13.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK TIM : IV	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11066 16	Jum Harianto Fatman	IP	Collaborative Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Nur Khaerah, S.Ip., M.IP	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si(Ketua) 2. Dr. Jaelian Usman, M.Si
2	10564 11128 16	Sri Wahyuni	IP	Publis-Private Partnership dalam Pemberdayaan Lansia (Jansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si 2. Dr. Nuryant Mustari, S.Ip., M.Si	3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si 4. Nur Khaerah, S.Ip., M.IP
3	10564 02035 14	Muhammad Nur	IP	Faktor Sukses E-Government dalam Program SIKS- NG di Kabupaten Gowa	1. Dr. Jaelian Usman, M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.IP	
4	10564 1132 16	Surahman B	IP	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja I. Kabupaten Enrekang	1. Dr. H. Muhsin Madani, M.Si 2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENINGGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN**
- Pertama :** Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
 - Kedua :** Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
 - Ketiga :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
 - Keempat :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 20 Februari 2021 M

Dekan,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Diponegoro, 20 Februari 2021
Dekan, S.Sos, M.Si

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.



**Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Selasa, 23 Februari 2021, Jam : 13.30 - Selesai Wita**

NO	STAMBUK TIM : 1	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11066 16	Aum Harianto Fatman	IP	Collaborative Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Nur Khaerah, S.Ip., M.IP	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si(Ketua) 2. Dr. Jaeian Usman, M.Si
2	10564 11128 16	Sri Wahyuni	IP	Publis Private Partnership dalam Pemberdayaan Lajut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si 2. Dr. Nuryanti Nugari, S.Ip., M.Si	1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si 4. Nur Khaerah, S.Ip., M.IP
3	10564 02035 14	Muhammad Nur	IP	Faktor Sukses E-Government dalam Program Siks- NG di Kabupaten Gowa	1. Dr. Jaeian Usman, M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.IP	
4	10564 1132 16	Surahman B	IP	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam Lewati Kabupaten Enrekang	1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si 2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nur, lahir di Teamate Pada tanggal 11 Agustus 1996, anak kedua dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda "**Abd Rasyid**" dan Ibunda "**Rohani**". Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) Pada SDN Gaurang Jawa 1 tahun 2002 dan selesai Pada Tahun 2008, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pattallassang dan selesai Pada Tahun 2011, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Pada SMAN 1 Bontomarannu. Penulis mengambil Jurusan IPS dan selesai Pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Faktor Sukses Penerapan *E-Government* dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* SIKS-NG di Kabupaten Gowa.